



### RINGKASAN BERTA HARI INI

#### PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO

## Komisi B Sebut Perlu RAD untuk Penataan Pasar Tradisional

Komisi B DPRD Sidoarjo menilai bahwa penataan pasar tradisional memerlukan regulasi yang lebih ketat. Ketua Komisi B, Agus Pramono, mengatakan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup untuk mengatur aktivitas di pasar tradisional. "Perlu ada regulasi yang lebih ketat, terutama terkait dengan sanitasi, keamanan, dan kenyamanan bagi pengunjung," ujarnya.

Agus Pramono juga menyebutkan bahwa regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi pedagang dan pembeli di pasar tradisional. "Kita harus memastikan bahwa pasar tradisional tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat," katanya.

## 341 Ribu Warga Belum Aktivasi IKD

KOTA Aktivasi Identifikasi Kewajiban Pajak (IKD) masih belum mencapai 341 ribu warga. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Agus Pramono, mengatakan bahwa masih banyak warga yang belum mengaktifkan IKD. "Kita harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada warga agar mereka lebih aware tentang pentingnya mengaktifkan IKD," ujarnya.

Agus Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif bagi warga yang mengaktifkan IKD. "Kita akan memberikan insentif berupa potongan pajak untuk warga yang mengaktifkan IKD," katanya.

#### Hapus Layanan Retribusi Manual

## Sema Layanan Retribusi Beralih ke Digital

SIDOARJO, SURYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bakal menghapus layanan retribusi manual. Dalam waktu dekat, semua layanan retribusi akan diganti menggunakan skema retribusi digital. "Kita akan menghapus layanan retribusi manual dan menggantinya dengan layanan retribusi digital," ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Agus Pramono.

Agus Pramono juga menyebutkan bahwa layanan retribusi digital akan lebih efisien dan transparan. "Layanan retribusi digital akan memudahkan warga untuk membayar retribusi dan mengurangi risiko kecurangan," katanya.

#### Targetkan Raih Rp 70 Miliar dalam Setahun

SIDOARJO - Pemkab mengtargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 70 miliar dalam setahun. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Agus Pramono, mengatakan bahwa target tersebut akan dicapai melalui peningkatan pendapatan asli daerah. "Kita akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah non pajak," ujarnya.

Agus Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah non pajak. "Kita akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah non pajak," katanya.

## Bersama Ning Sasha Kabupaten Deli Serdang Belajar Pelayanan di UPTD ABK Sidoarjo

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, bersama rombongan mengunjungi Kabupaten Deli Serdang untuk belajar pelayanan di UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Bupati Muhdlor mengatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo akan mencontohkan pelayanan yang baik di UPTD ABK Deli Serdang. "Kita akan belajar dari Kabupaten Deli Serdang tentang pelayanan yang baik di UPTD ABK," ujarnya.

Bupati Muhdlor juga menyebutkan bahwa Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan pelayanan di UPTD ABK. "Kita akan meningkatkan pelayanan di UPTD ABK melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan pelayanan di UPTD ABK," katanya.

## Purnawiyata 380 Siswa SMPN 2 Sidoarjo Kasek: Perjuangan Kalian Masih Panjang

SIDOARJO, MEMO X - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, mengunjungi SMPN 2 Sidoarjo untuk memberikan purnawiyata kepada 380 siswa. Bupati Muhdlor mengatakan bahwa perjuangan siswa-siswanya masih panjang. "Perjuangan kalian masih panjang, jadi jangan menyerah," ujar Bupati Muhdlor.

Bupati Muhdlor juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mendukung siswa-siswanya dalam melanjutkan pendidikan. "Kita akan mendukung siswa-siswanya dalam melanjutkan pendidikan melalui berbagai cara, termasuk memberikan beasiswa," katanya.

## Hadi Suyitno: Caleg Tunggu Putusan MK Sistem Pemilu

SIDOARJO - Jelang pemilihan umum, Hadi Suyitno menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu. Hadi Suyitno mengatakan bahwa ia akan menunggu putusan MK mengenai sistem pemilu. "Saya akan menunggu putusan MK mengenai sistem pemilu," ujar Hadi Suyitno.

Hadi Suyitno juga menyebutkan bahwa ia akan mengikuti pemilu dengan baik. "Saya akan mengikuti pemilu dengan baik dan jujur," katanya.

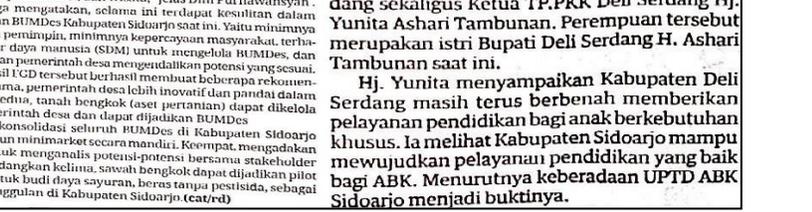
## Kampung Bebek karena Mayoritas Beternak Bebek

SIDOARJO - Meski lambang Sidoarjo adalah udang dan bandeng, Kota Delta juga punya kampung bebek. Kampung tersebut berada di Desa Kebonsari, Candi. Tidak sulit menemukan lokasi ini karena ada gapura besar yang bertuliskan Kampung Bebek. Menurut Suyitno, mautan perangkai desa, kampung tersebut berdiri pada 2010 atau masa Bupati Win Hendroso.

Sebelumnya, wilayah tersebut masuk golongan desa tertinggal. "Terus dari sana berkembang, sebagian keluarga saya jadi inisiator pengerak kelompok peternak bebek," tuturnya. Ternyata, bebek bebek tersebut berhasil berkembang hingga diikuti warga lain. Bahkan, berhasil menjuarai beberapa ajang tingkat nasional.

Bebek dipilih karena pemeliharaannya tergolong gampang dan tidak mudah terserang penyakit. "Di samping itu, pakan bebek di sini cukup melimpah dan gampang," jelasnya. Bahkan, menurut dia, ada suatu masa komoditas bebek di Kebonsari itu mencapai hingga 80 ribu ekor lebih.

Meski begitu, penjualan bebek tahun belakangan akibat pandemi sempat sedikit loyo. "Alhamdulillah, tahun ini perlahan naik," jelasnya. Hingga saat ini ada sekitar 30 peternak dan penjual telur di kampung bebek. (eja/cb/any)



## Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO



# Komisi B Sebut Perlu RAD untuk Penataan Pasar Tradisional



**BAMBANG PUJIANTO**  
Ketua Komisi B



**DENY HARYANTO**  
Anggota Komisi B



**SULLAMUL HADI NURMAWAN**  
Anggota Komisi B

KOMISI B DPRD Sidoarjo memberikan dukungan yang kuat terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk meningkatkan standar pasar tradisional. Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) harus memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam melaksanakan standarisasi pasar-pasar tradisional. Agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) "Saya sangat setuju jika pasar-

pasar itu diharmonisasikan dengan standar SNI. Namun, penataan yang serius harus dilakukan," ujarnya. Menurut dia, RAD diperlukan sebagai langkah strategis guna meningkatkan kondisi dan pelayanan pasar tradisional yang merupakan pusat ekonomi masyarakat. Anggota Komisi B Sullamul Hadi Nurmawan juga menyebut pasar-pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek wisata belanja. Sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat.

Pasalnya, keberadaan pasar tradisional telah terbukti dapat bertahan dalam situasi krisis moneter dan dampak pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. "Oleh karena itu, penataan harus dilakukan dalam berbagai aspek, seperti kebersihan, fasilitas, kenyamanan, dan lain sebagainya," jelasnya. Dalam hal ini, pria yang akrab disapa Wawan tersebut menegaskan bahwa Disperindag harus segera menyusun RAD agar upaya peningkatan pasar sesuai dengan SNI tidak hanya menjadi wacana.



PERUBAHAN: Pasar Larangan yang rencananya akan diperbaiki hingga menjadi pasar SNI.

Selain itu, Disperindag juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar-pasar tradisional secara menyeluruh, tanpa hanya memilih penanganan yang sepihak. Anggota Komisi B Deny Haryanto menambahkan, keterlibatan semua pihak dalam RAD sangat penting. Dalam pembentukan tim khusus, perlu melibatkan para ahli, akademisi,

serta stakeholder terkait untuk mendapatkan pemikiran dan masukan yang komprehensif. "Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kita dapat mewujudkan penataan pasar tradisional yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya. Diharapkan dengan adanya RAD dan kerjasama yang solid antara pemerintah kabupaten,

DPRD, dan seluruh pihak terkait penataan pasar tradisional di Kota Delta dapat berjalan efektif dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Masyarakat akan dapat menikmati suasana pasar yang lebih bersih, tertib, dan nyaman, sementara para pedagang akan merasakan peningkatan dalam hal pelayanan dan pendapatan. (nis/vga)



# Targetkan Raih Rp 70 Miliar dalam Setahun

Gandeng Kejaksaan untuk Tagih Piutang Pajak

SIDOARJO - Pemkab menggandeng Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mempercepat penagihan piutang pajak daerah. Targetnya, dalam setahun ini tertagih Rp 70 miliar. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, pada 2022 ada rekor baru hasil penagihan piutang pajak. Hal itu tercapai berkat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo lewat surat kuasa khusus (SKK) untuk melakukan penagihan. Tahun lalu, terhimpun

Rp 5 miliar dari target Rp 11 miliar. "Tahun lalu rekor baru, tahun ini harapannya bisa rekor lagi," ujar Muhdlor. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, hasil penagihan piutang tidak pernah di atas Rp 1 miliar. Hanya sekitar Rp 700 juta. Tahun ini, targetnya bisa terhimpun Rp 70 miliar. Karena itu, kemarin (13/6) siang bupati Sidoarjo bersama Kejari Sidoarjo menandatangani komitmen bersama penagihan piutang pajak daerah. Selain penagihan piutang pajak, Muhdlor mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghapus layanan retribusi manual. Sebagai gantinya, harus digital. Karena itu, selain



PERCEPATAN: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menandatangani komitmen bersama penagihan piutang pajak daerah sekaligus komitmen ETPD kemarin (13/6).

penandatanganan komitmen penagihan piutang, kemarin Muhdlor menandatangani

komitmen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bersama OPD penghasil retribusi.

"Jangan lagi pakai kertas, pakai karcis. Apa bedanya dengan puluhan tahun lalu," pinta Muhdlor. Seluruhnya harus beralih ke digital. "Digitalisasi ini sudah menjadi kewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendapatan," jelasnya. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, untuk transaksi pajak daerah, seluruhnya sudah digital. Hanya, masih ada OPD penghasil retribusi yang masih manual. Misalnya, retribusi pasar dan retribusi parkir. Karena itu, pihaknya segera menyelaraskan

pembayaran dan pelayanan berbasis digital oleh organisasi perangkat daerah di Sidoarjo. Direktur Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim Bandoe Widiarto menyebutkan, BI mendorong tiga hal dalam digitalisasi. Yakni, digitalisasi bantuan sosial, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah, dan digitalisasi transportasi. "Digitalisasi transaksi di pemerintahan ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mewujudkan e-government," jelasnya. (uzi/c7/any)

# Jawa Pos

## Hapus Layanan Retribusi Manual

**SIDOARJO, SURYA** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bakal menghapus layanan retribusi manual. Dalam waktu dekat, semua layanan retribusi akan diganti menggunakan skema retribusi digital.

Untuk mempercepat realisasi program Elektronifikasi Transaksi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, sejumlah OPD penarik retribusi menandatangani komitmen bersama, Selasa (13/6).

"Sinergisitas elektronifikasi antar dinas diharapkan berjalan secara holistik dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas," kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Menurut Gus Muhdlor, saat ini sejumlah instansi tidak bisa lepas dari digitalisasi terutama dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, elektronifikasi juga dapat memangkas birokrasi yang berbelit menjadi lebih

mudah.

"Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan," tandasnya.

Dia bahkan menyebut bahwa sekarang ini sudah tidak jamannya memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan.

Disebutnya, semakin busa menghindari banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin lebih profesional dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sudah tidak jamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit semua harus menerapkan digitalisasi," tegas Gus Muhdlor.

Sejumlah OPD penghasil retribusi juga berkomitmen untuk bersama-sama dalam



SURYA/M TAUFIK

**KOMITMEN BERSAMA** - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (tengah) usai menandatangani komitmen bersama dalam high level meeting bersama sejumlah OPD pemungut retribusi di Sidoarjo.

mengimplementasi elektronifikasi transaksi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan bersama terkait komitmen penagihan piutang bersama Kajari Sidoarjo dan penandatanganan komitmen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh OPD penghasil retribusi.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono menambahkan, pembayaran

elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri.

"Memang masih ada beberapa yang belum menerapkan digitalisasi, tapi untuk pajak sejauh ini sudah 100 persen menerapkan digitalisasi," ungkap Ari.

Tujuan dari high level meeting yang digelar ini, kata dia, untuk menyelaraskan pembayaran dan pelayanan berbasis digitalisasi oleh organisasi perangkat daerah. (ufi)

SURYA

## 341 Ribu Warga Belum Aktivasi IKD



DIKEBUT: Layanan jemput bola Dispendukcapil Sidoarjo untuk aktivasi IKD.

**KOTA**-Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menyasar sekitar 29 ribu warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo Reddy Kusuma menyebutkan bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitar 8 persen dari total 370 ribu warga yang ada di Sidoarjo. Untuk itu, pihaknya terus gencar melakukan layanan jemput bola.

Reddy menjelaskan, saat ini IKD sudah dapat digunakan di bandara dan stasiun. Selain itu juga masih dalam tahap penjajakan untuk diterapkan di Bank Jatim dan institusi lainnya.

Sebelum implementasi resmi dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, pihaknya wajib melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD terlebih dahulu. "Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Sidoarjo memahami dan dapat menggunakan IKD dengan baik," katanya.

IKD merupakan salah satu inisiatif pemerintah

dalam menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan adanya IKD, warga Sidoarjo akan lebih mudah dan cepat dalam mengakses berbagai layanan yang membutuhkan identitas seperti penerbitan dokumen, pembukaan rekening bank, dan transaksi keuangan lainnya.

Reddy juga menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas cakupan penggunaan IKD di berbagai lembaga dan sektor lainnya guna mempermudah akses dan pelayanan publik bagi masyarakat. Dia mengimbau seluruh warga Sidoarjo untuk memanfaatkan program aktivasi IKD yang dijalankan hingga saat ini.

Dengan implementasi IKD yang lebih luas, diharapkan dapat tercipta administrasi kependudukan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi secara digital. Ini akan membantu masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif dengan lebih mudah dan cepat. (nis/vga)



## Semua Layanan Retribusi Beralih ke Digital

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam waktu dekat ini bakal menghapus layanan retribusi manual. Kemudian diganti dengan skema retribusi digital. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, sejumlah OPD penarik retribusi menandatangani komitmen bersama dalam high level meeting. Mereka berdiskusi bersama membahas Implementasi Elektronifikasi Transaksi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (13/6).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor meminta sinergitas elektronifikasi antardinas berjalan secara holistik dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo selaku koordinator menghadirkan Kabag Organisasi, Kajari, Bank Jatim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta Mendagri serta tim percepatan dan perluasan

● Ke Halaman 10

INOVATIF: Bupati Sidoarjo menandatangani komitmen bersama layanan retribusi digital bersama Kejar Sidoarjo.



## Semua Layanan...

digitalisasi daerah.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengatakan, saat ini sejumlah instansi tidak bisa lepas dari digitalisasi terutama dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, elektronifikasi juga dapat memangkas birokrasi yang berbelit menjadi lebih mudah.

“Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan,” katanya.

Menurut dia, sudah tidak zamannya memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual. Hal tersebut yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan.

Gus Muhdlor juga menambahkan bahwa semakin mengurangi banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin profesional dan

bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sudah tidak zamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit, semua harus menerapkan digitalisasi,” tegas Gus Muhdlor.

Selain itu sejumlah OPD penghasil retribusi juga berkomitmen untuk bersama-sama dalam mengimplementasi elektronifikasi transaksi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini ditandai dengan pendatangannya bersama terkait komitmen penagihan piutang bersama Kajari Sidoarjo dan pendatanganannya komitmen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh OPD penghasil retribusi.

Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono menambahkan, pembayaran elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri. (nis/vga)



## Pemdes Pilang Realisasikan Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

Sidoarjo, Memorandum

Implementasi Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022 terkait pengaturan penggunaan dana desa yaitu paling sedikit 20 persen penggunaan dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Pilang, Kecamatan Wonoayu yang merealisasikan program ini dengan pembudidayaan ikan serta perkebunan buah jeruk, jambu, dan lain sebagainya di dalam bidang pertanian.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemdes menerapkan sistem bagi hasil yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan sebagian ada yang disewakan. Dengan adanya program ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat yang kurang mampu dalam semangat penanganan percepatan perekonomian nasional.

Kepala Desa (Kades) Pilang II Alfad mengatakan bahwa program ketahanan pangan yang dilakukan di desa ini telah berhasil memanfaatkan dana desa untuk budi daya ikan dan perkebunan macam-macam buah.

"Pemerintah telah memberikan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen.



Perkebunan buah-buahan dan kolam budi daya ikan yang berlokasi di Dusun Pilang, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu.

Dan kami berharap masyarakat khususnya Desa Pilang dapat berinovasi melahirkan program-program yang bermanfaat," ujar Alfad. Sekretaris Desa (Sekdes) Pilang Arif Masjedin menjelaskan, dana desa (DD) 20 persen melalui ketahanan pangan tersebut, masyarakat mampu mengembangkan dan menjaga ketersediaan pangan, minimal dalam keluarga sudah tercukupi melalui cadangan makanan, keberagaman

konsumsi pangan.

Hal ini sesuai dengan amanat 4 pilar ketahanan pangan. "Kami selaku pemdes bersama tenaga ahli, para pendamping desa (PID) dan pendamping lokal desa (PLD) terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola DD tersebut, supaya lebih tepat sasaran dan tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (zam/jok/nov)

**MEMORANDUM**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Bersama Ning Sasha

## Kabupaten Deli Serdang Belajar Pelayanan di UPTD ABK Sidoarjo

Sidoarjo, Memo X

Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengunjungi Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya untuk studi tiru (belajar) pelayanan UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kabupaten Sidoarjo, Senin (12/06/2023). Rombongan ini datang ke UPTD ABK Sidoarjo yang dipimpin Bunda PAUD Deli Serdang sekaligus Ketua TP PKK Deli Serdang, Ny Yunita Ashari Tambunan. Perempuan ini merupakan istri Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan.

Saat tiba di UPTD ABK Sidoarjo, Yunita disambut hangat Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo yang juga Ketua TP PKK Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor. Ny Sa'adah tidak lain istri Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali ini menjelaskan semua pelayanan yang ada di UPTD ABK Sidoarjo itu.

Ny Yunita mengatakan Kabupaten Deli Serdang masih terus berbenah memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dirinya melihat Kabupaten Sidoarjo mampu mewujudkan pelayanan pendid-

dikan yang baik bagi ABK.

"Keberadaan UPTD ABK Sidoarjo menjadi buktinya. Karena kegiatan kami ini akan menjadi bekal kami membangun pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih baik lagi di daerah kami," ujar Ny Yunita kepada Memo X, Senin (13/06/2023).

Selain itu, Bunda PAUD Deli Serdang ini menilai UPTD ABK Sidoarjo mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi ABK di Sidoarjo. Karena itu, dirinya akan meniru pelayanan yang ada di UPTD ABK Sidoarjo. "Pembangunan pusat pendidikan ABK seperti ini menjadi mimpi untuk Deli Serdang. Kami berpikir mewujudkan pusat pendidikan bagi ABK di wilayah kami. Mudah-mudahan bisa terwujud," pintanya.

Yunita mengaku saat ini ada 16 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di beberapa kecamatan. Terdapat 300 anak berkebutuhan khusus yang belajar di tempat itu. Karena itu, dirinya berusaha mewujudkan pembangunan PKBM yang terpusat di satu tempat.

"Hal ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh ak-



STUDI TIRU - Bunda PAU Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor mendampingi Pokja Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang, Sumut studi tiru (belajar) pelayanan UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sidoarjo, Senin (12/06/2023).

ses layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kami memikirkan Deli Serdang nanti memiliki satu wadah seperti ini. Jadi ranting-rantingnya nanti juga di PKBM," tegasnya.

Sementara Bunda PAUD Sido-

arjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor menegaskan komitmen terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus tidak hanya dari pemerintah saja. Butuh peran semua pihak untuk mewujudkan pelayanan ABK yang lebih

baik. Seperti dari organisasi agar mandiri. Karena itu, orang tua ABK harus peduli terhadap pendidikan anaknya.

"Harus ada kontrak orang tua dengan lembaga (UPTD ABK Sidoarjo) agar orang tua ada keseriusan menjadikan anaknya menjadi mandiri," urainya.

Sementara Kepala UPTD ABK Sidoarjo Nishrina Khamida menyampaikan ada beberapa layanan yang diberikan UPTD ABK Sidoarjo. Diantaranya layanan skrining ABK, assesmen ABK, intervensi ABK serta support system. Terdapat 53 orang yang mengabdikan diri di UPTD ABK Sidoarjo. Mereka diantaranya sebagai psikolog klinis, visio terapis maupun tenaga terapis pendidik.

"Fungsi UPTD ABK Sidoarjo antara lain identifikasi dan deteksi dini, layanan intervensi dini, layanan kelas transisi dan juga support system," tandasnya.

Dalam kesempatan ini rombongan diantar melihat satu persatu ruang kelas. Diantaranya ruang Snozelen, ruang motorik besar, kelompok kecil dan kelas transisi. "Termasuk mengecek ruang bina diri untuk membekali ABK keterampilan," pungkasnya. (par/wan)

## Purnawiyata 380 Siswa SMPN 2 Sidoarjo Kasek: Perjuangan Kalian Masih Panjang

### Sidoarjo, Memo X

Sebanyak 380 siswa dan siswi kelas IX SMPN 2 Sidoarjo mengikuti prosesi purnawiyata (wisuda). Acara yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo, Dr Tirta Adi beserta para dewan guru, mantan Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta para orang tua wali siswa ini digelar di Hall Sun City Hotel Sidoarjo, Selasa (13/06/2023).

Kepala SMPN 2 Sidoarjo, Qodim mengatakan saat ini prestasi SMPN 2 Sidoarjo semakin nyata. Bahkan sekolah yang memiliki brand sekolah olahraga ini kompetensinya juga lengkap. Mulai kompetensi akademik sampai nonakademik. Salah satunya prestasi dalam bahasa Inggris serta IPA berskala nasional Kemendikbud. Termasuk ada Duta Sosial yang merupakan pelajar alumni SMPN 2 Sidoarjo.

"Semua prestasi anak-anak didik ini berkat dukungan semua. Bahkan program kami berjalan dengan baik dan hasilnya nyata. Tidak heran kalau sekarang trend dan indikator sekolah ini semakin bagus. Biasanya



**PURNAWIYATA - Kepala SMP Negeri 2 Sidoarjo, Qodim memberikan sambutan dan pesan kesan kepada 380 siswa kelas IX yang menjalani Purnawiyata angkatan ke 65 Tahun Ajaran 2022/2023 di Hall Sun City Hotel Sidoarjo, Selasa (13/06/2023).**

kalau kakaknya masuk SMPN 2 biasanya adiknya juga akan ikut masuk di SMPN 2 Sidoarjo. Terima kasih semua atas partisipasinya," ujar Qodim kepada Memo X, Selasa (13/06/2023).

Tidak hanya itu, lanjut Qodim saat ini kapasitas masjid yang tidak mampu menampung 1.117 siswa langsung direhab dengan pagu anggaran Rp 4 miliar. Targetnya masjid sekolah bakal menampung 1.200 jamaah. Meski saat ini kapasitasnya baru

560 jamaah.

"Alhamdulillah pekerjaan re-hab masjid sekarang sudah 40 persen. Sumbangan terus mengalir dari para alumni termasuk infaq dari para siswa. Karena kami menyiapkan anak didik dengan pendidikan spiritual dan karakter," ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Qodim dari 380 siswa kelas IX saat ini lulus 100 persen. Akan tetapi perjuangan para anak didik belum selesai karena masih pan-

jang. Masih ada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. "Perjuangan kalian masih panjang, perlu belajar lebih keras lagi. Semoga bisa mengenyam pendidikan lebih baik dan menjadi generasi sukses dan berpartisipasi membangun negara ini. Tetap jaga nama baik SMPN 2 Sidoarjo dan kalau jadi pejabat jangan lupa guru dan almamaternya," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo, Dr Tirta Adi menegaskan tiga pesan trigatra. Yakni pahami bahasa Indonesia, lestarikan budaya Jawa dan kuasai bahasa asing. "Prestasi SMPN 2 Sidoarjo sudah banyak. Bahkan ada alumni yang menjadi Bupati, Rektor dan Kapolres. Sekarang tinggal merawat mama baik dan branding sekolah. Jadi jaga nama baik SMPN 2 Sidoarjo," tandas Tirta Adi.

Sementara selama prosesi acara itu juga dilengkapi berbagai pertunjukkan musik dan tari yang merupakan kreasi siswa dan siswi SMPN 2 Sidoarjo sendiri. (par/wan)

MEMO X



**BANTUAN PANGAN:** Warga menunggu panggilan saat penyaluran beras di Sukodono kemarin. Ini merupakan tahap terakhir pemberian bantuan beras.

## Salurkan Bantuan Beras Tahap Terakhir

**SIDOARJO** - Penyaluran bantuan sosial beras (BSB) tahap ketiga dari Kemensos untuk 92.685 warga di Sidoarjo mulai dilakukan. Ini merupakan tahap terakhir. Setelah itu, tak ada lagi bantuan beras.

Bantuan yang diperuntukkan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) itu

dibagikan tiga kali sejak April lalu. Tiap bulan, penerima mendapatkan 10 kilogram beras.

Untuk tahap ketiga, beras dibagikan mulai 3 Juni yang diawali di Kecamatan Jabon. Kemudian berlanjut ke Kecamatan Prambon dan Candi. Kemarin (13/6) penyaluran dilakukan di Kecamatan Sukodono. Yakni, di Desa Wilayat, Kebonagung, Pekaru-

ngan, Suruh, dan Jumputrejo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyerahkan secara langsung kepada penerima. "Bantuan ini merata dibagikan ke setiap desa. Programnya sudah baik, eksekusinya juga harus baik," kata Muhdlor setelah menyerahkan kepada warga Desa Pekarungan kemarin. Artinya, harus tepat sasaran. Pibaknya juga meminta Dinas Sosial

Sidoarjo dan pemerintah desa turut mengawal penyaluran agar tepat sasaran. "Harapannya, ini bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya," ujar Muhdlor. Meskipun saat ini penyaluran tahap akhir, dia meminta pemerintah desa atau siapa pun yang mengetahui ada warga yang kesulitan makan sehari-hari bisa melapor langsung ke Dinas Sosial Sidoarjo. (uzi/c19/ary)

# Jawa Pos

## Ada Kemiripan Potongan Tubuh di Kenpark dan Trosobo

### Lakukan Uji DNA dan Pemeriksaan Forensik

PORONG-RS Pusdik Bhayangkara Porong telah mengungkapkan hasil potongan tubuh manusia yang ditemukan di Sidoarjo dan Surabaya. Potongan tubuh tersebut mulai dari pinggul hingga tumit mata kaki. Namun tidak memiliki telapak kaki baik di sisi kanan maupun kiri. Meski

begitu, hingga saat ini belum diketahui identitasnya atau asal-usulnya.

Kepala RS Pusdik Bhayangkara Porong AKBP Eko Junianto menjelaskan, potongan tubuh yang diterima hingga Senin (12/6) malam adalah potongan tubuh manusia yang tidak utuh. Tungkai bagian atas dan bawah ada, namun telapak kaki kanan dan kiri tidak ada karena terjadi pemotongan dan mutilasi di area tersebut.

Pihaknya juga ingin menekankan bahwa dari pemeriksaan awal, hasil menunjukkan bahwa mutilasi terjadi setelah kematian. "Saat ini, kami sedang melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah potongan ini berasal dari satu individu atau lebih," katanya. Dia menyebutkan, dalam pemeriksaan awal pihaknya dapat menyimpulkan bahwa potongan tubuh tersebut



PENYELIDIKAN: Potongan tubuh korban mutilasi saat diperiksa di RS Pusdik Bhayangkara Porong.

● Ke Halaman 10



### Ada Kemiripan...

berasal dari seorang pria. Hal itu terlihat dari adanya alat kelamin jenis laki-laki. Panjang potongan tubuh tersebut sekitar 90 cm mulai dari pinggul hingga telapak kaki. Berdasarkan potongan tubuh itu, perkiraan tinggi badan sekitar 170 cm.

Pihaknya belum menemukan ciri-ciri khusus yang dapat mengidentifikasi individu tersebut. Namun, setelah melakukan rekonstruksi terhadap potongan tubuh pertama, Eko menemukan adanya kemiripan. "Masih perlu pemeriksaan forensik mendalam dan uji DNA masih harus dilakukan untuk memastikan apakah potongan ini berasal dari satu individu atau individu yang berbeda," imbuhnya.

Menurut hasil pemeriksaan, perkiraan waktu kematian berkisar antara 4 hingga 5 hari yang lalu. Jenazah yang ditemukan pada Senin (12/6) memiliki kesamaan yang tidak jauh

berbeda dengan jenazah sebelumnya yang ditemukan.

Selain itu, Eko juga menyebutkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kaki yang diperiksa. Begitu juga dengan bagian tubuh lainnya. Namun, terdapat luka-luka yang menunjukkan upaya pemotongan, meskipun tidak berhasil. Luka-luka tersebut terdapat di bagian lutut.

Eko menjelaskan, potongan tersebut terlihat seperti diiris, bukan hasil bacakan kasar. Terutama di daerah persendian. "Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan tentang struktur persendian manusia," sebutnya.

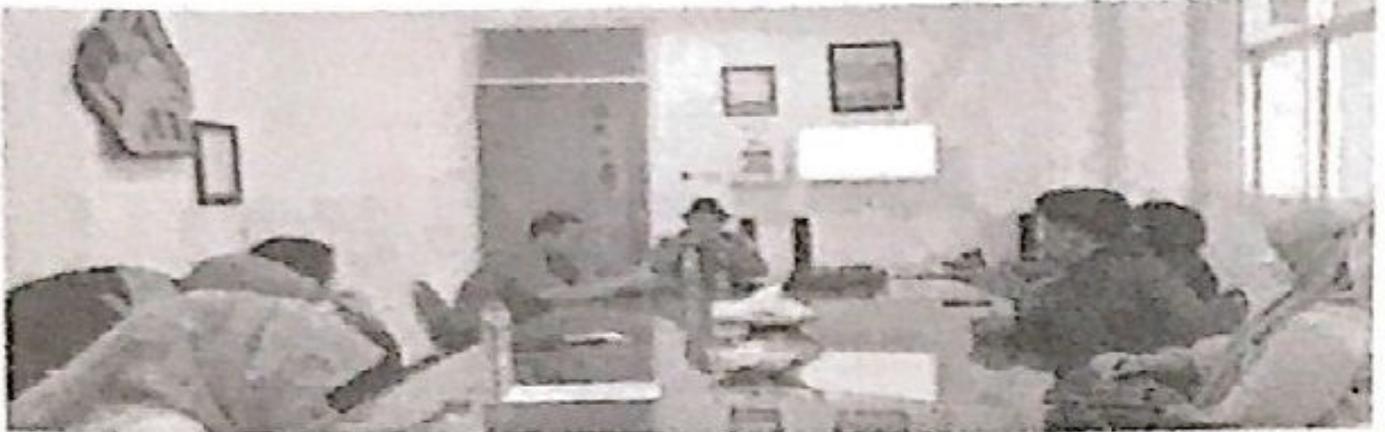
Pihaknya juga telah menerima laporan dari satu keluarga yang sedang menjalani penyidikan. Saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel DNA yang dapat diperoleh dari orangtua atau anak kandung. "Laporan yang kami terima berasal dari kakak kandung," ujarnya. (gun/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



**Suasana FGD dengan tema BUMDes Membangun Perekonomian Desa di Kabupaten Sidoarjo.**

## **Gelar FGD, Prodi AP Umsida Usulkan 5 Rekomendasi**

**Sidoarjo - HARIAN BANGSA**

Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP) Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema BUMDes Membangun Perekonomian Desa di Kabupaten Sidoarjo.

Acara yang digelar pada Selasa (13/6) tersebut, menghadirkan narasumber Dini Purnawansyah selaku pengamat BUMDes Provinsi Jawa Timur. Tujuan FGD tersebut adalah menganalisis permasalahan dan potensi BUMDes terpilih, untuk dijadikan sebagai dasar penerapan inovasi program di Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris Dosen Prodi Administrasi Publik Hendra Sukmana memaparkan bahwa banyak mahasiswanya yang memilih topik penelitian yang berkaitan dengan BUMDes. "Saya harap alumni juga harus mewedahi dan menjembatani mahasiswa Prodi AP untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkini terkait BUMDes di Indonesia," papar Hendra.

"Saat ini Kabupaten Sidoarjo memiliki 282 BUMDes. Di antaranya sebanyak 182 BUMDes yang aktif berusaha, 46 BUMDes yang tidak aktif. Selanjutnya, terdapat beberapa bidang yang dijalankan BUMDes Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya bidang jasa, kuliner, wisata, perdagangan, perikanan, pertanian, peternakan, dan wisata," jelas Dini Purnawansyah.

Dini juga mengatakan, selama ini terdapat kesulitan dalam mendirikan BUMDes Kabupaten Sidoarjo saat ini. Yaitu minimnya komitmen pemimpin, minimnya kepercayaan masyarakat, terbatas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes, dan kemampuan pemerintah desa mengendalikan potensi yang sesuai.

Dari hasil FGD tersebut berhasil membuat beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah desa lebih inovatif dan pandai dalam potensi. Kedua, tanah bengkok (aset pertanian) dapat dikelola baik pemerintah desa dan dapat dijadikan BUMDes

Ketiga, konsolidasi seluruh BUMDes di Kabupaten Sidoarjo membangun minimarket secara mandiri. Keempat, mengadakan forum untuk menganalisis potensi-potensi bersama stakeholder terkait. Sedangkan kelima, sawah bengkok dapat dijadikan pilot project untuk budi daya sayuran, beras tanpa pestisida, sebagai produk unggulan di Kabupaten Sidoarjo. (cat/rd)

## Hadi Suyitno : Caleg Tunggu Putusan MK Sistem Pemilu

**SIDOARJO** - Jelang pemilu, khususnya pileg (pilihan legislatif) 2024 banyak harapan dan tanggapan. Khususnya warga dan caleg dalam pelaksanaan Pemilu yang mana sistem terbuka atau tertutup. Karena perbedaannya sangat jelas yakni coblos gambar partai (tertutup) atau sistem terbuka yakni coblos gambar caleg bersangkutan dari partai.

Terkait hal ini banyak tanggapan beragam muncul. Salah satunya dari wartawan senior yang juga mantan ketua PWI Kabupaten Sidoarjo Hadi Suyitno.

Hadi mengatakan, Jelang Pemilu ini merupakan barang yang ditunggu seluruh Bacaleg sudah diujung mata. Tanggal 15 Juni dua hari kedepan menjadi hari keramat yang akan menentukan iman politik bacaleg untuk maju terus atau memilih kabur (mundur) dari pencalegkan," ujar Hadi.

Lanjut Hadi keputusan hukum yang diputuskan MK sangat mempengaruhi iklim politik. Bahkan baru kali ini dalam sejarah, 8 parpol "ngluruk" MK untuk mendengar pembacaan putusan dari uji materi pilpres dari sistem terbuka. Ini sebuah fenomena yang belum terjadi. Dahsyatnya putusan itu dampaknya luar biasa bagi parpol.

"Apakah dalam pilpres 2024 nanti menggunakan sistem tertutup seperti yang ditengarai prof Denny Indrayana atau dikembalikan pada sistem proporsional terbuka," tanya Hadi.

Menurut mantan ketua PWI Kabupaten Sidoarjo, prediksi saya putusannya menggunakan sistem tertutup dengan beberapa varian. Varian itu adalah masih ada wajah caleg dan parpol yang dicoblos. Jadi wajah caleg masih nongol dan itu memungkinkan penggunaan BPP (bilangan pembagi pemilih) dibuat serendah mungkin sebagai bahan komprominya," terangnya.

Bila putusannya tertutup murni alias coblos gambar parpol saja (tanpa gambar wajah), pasti terjadi gempa dahsyat. Para caleg di nomor 2 atau 3 ke atas akan memilih kabur kecuali caleg parpol papan atas.

Masih kata Hadi, kenapa dugaan saya mengarah ke sistem tertutup? Karena proses perjalanan MK memutus begitu lama. Tarik ulurnya mencekram sangat kuat. Padahal makin lama memutus, resistensinya makin berat. Persoalannya jadi terakumulasi.

"Seharusnya dari dulu-dulu atau sebelum pendaftaran DCS (daftar calon tetap) vonis itu sudah dibacakan. Agar para caleg tidak terombang-ambing," pungkas Hadi Suyitno.

Dikesempatan berbeda beberapa Caleg baik incumbent maupun caleg baru kepada wartawan memastikan bakal mundur bila mana sistem Pemilu menggunakan tertutup. Hal ini disampaikan diantaranya dua caleg. Yakni caleg dari PDIP dan Caleg dari PBB (Partai Bulan Bintang). • Loe



DOK/DUTA

Hadi Suyitno mantan ketua PWI Kabupaten Sidoarjo foto bersama Ketua Umum PKB Abdul Muhaemin Iskandar.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Minimalisir Kebocoran Retribusi di Sidoarjo Akan Terapkan Elektronik

### Sidoarjo, Bhirawa

Tiga belas OPD di Kabupaten Sidoarjo, Selasa (13/6) kemarin, melakukan MoU dan tanda tangan, sebagai komitmen bersama dengan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD), yang disaksikan Bupati Ahmad Muhdlor Ali, di hotel Luminor Sidoarjo.

OPD tersebut diantaranya meliputi Disperindag, Dishub, DLHK, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perkim, BPBD, Disporapar, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kominfo, Dinkes, BPKAD dan Bagian Hukum Kabupaten Sidoarjo.

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono SSos MSi, mengatakan MoU tersebut dilakukan untuk Implementasi Eletronifikasi Transaksi Daerah (IETD) dalam hal pembayaran retribusi. "IETD ini tujuannya untuk bisa mencegah kebocoran dalam pembayaran retribusi," kata Ari, dalam kesempatan itu.

Bupati Ahmad Muhdlor Ali minta kinerja di OPD Kabupaten Sidoarjo berubah. Tidak lagi berpola seperti 20 tahun lalu. Pj Sekda Sidoarjo, ia perintahkan untuk mengontrol. "Sistem pelayanan berbasis elektronik harus mulai diterapkan di Kabupaten Sidoarjo," katanya yang hadir dalam kesempatan itu. [kus.ca]

HARIAN  
**Bhirawa**

## Kampung Bebek karena Mayoritas Beternak Bebek

**SIDOARJO** – Meski lambang Sidoarjo adalah udang dan bandeng, Kota Delta juga punya kampung bebek. Disebut begitu karena warganya jago beternak bebek dan membuat telur asin.

Kampung tersebut berada di Desa Kebonsari, Candi. Tidak sulit menemukan lokasinya karena ada gapura besar yang bertuliskan Kampung Bebek. Menurut Syahroni, mantan perangkat desa, kampung tersebut berdiri pada 2010 atau masa Bupati Win Hendarso.

Sebelumnya, wilayah tersebut masuk golongan desa tertinggal. "Terus dari sana berkembang, sebagian keluarga saya jadi inisiator penggerak kelompok peternak bebek," tutuhnya. Ternyata, ternak bebek tersebut berhasil berkembang hingga diikuti warga lain. Bahkan, berhasil menjuarai beberapa ajang hingga tingkat nasional.

Bebek dipilih karena pemeliharaannya tergolong gampang dan tidak mudah terserang penyakit. "Di samping itu, pakan bebek di sini cukup melimpah dan gampang," jelasnya. Bahkan, menurut dia, ada suatu masa komoditas bebek di Kebonsari itu mencapai hingga 80 ribu ekor lebih.

Meski begitu, penjualan beberapa tahun belakangan akibat pandemi sempat sedikit loyo. "Alhamdulillah, tahun ini perlahan naik," jelasnya. Hingga saat ini ada sekitar 30 peternak dan penjual telur di kampung bebek. (eza/c6/any)



AHMAD REZA/JAWA POS

**PUSAT BEBEK DAN TELUR ASIN:** Tetenger Kampung Bebek di Desa Kebonsari, Candi, kemarin. Kampung tersebut ada sejak 2010.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



DARYANTODUTA

Ning Sasha sambut kunjungan Ketua TP PKK Deli Serdang.

## Studi Pelayanan ABK

**SIDOARJO** - Pokja (Kelompok Kerja) Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya studi tiru pelayanan UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kabupaten Sidoarjo.

Mereka datang ke UPTD ABK Sidoarjo. rombongan dipimpin oleh Bunda PAUD Deli Serdang sekaligus Ketua TP.PKK Deli Serdang Hj. Yunita Ashari Tambunan. Perempuan tersebut merupakan istri Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan saat ini.

Hj. Yunita menyampaikan Kabupaten Deli Serdang masih terus berbenah memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia melihat Kabupaten Sidoarjo mampu mewujudkan pelayanan pendidikan yang baik bagi ABK. Menurutnya keberadaan UPTD ABK Sidoarjo menjadi buktinya.

**DUTA**

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

“Kegiatan kami ini akan menjadi bekal kami dalam membangun pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih baik lagi di daerah kami,”ucapnya.

Bunda PAUD Deli Serdang Hj. Yunita menilai UPTD ABK Sidoarjo telah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi ABK di Kabupaten Sidoarjo. Ia akan tiru pelayanan yang ada di UPTD ABK Sidoarjo. Pembangunan pusat pendidikan ABK seperti ini menjadi mimpinya untuk daerahnya.

“Kami berpikir bagaimana mewujudkan pusat pendidikan bagi ABK diwilayah kami, mudah-mudahan ini terwujud,”sampainya.

Hj. Yunita mengatakan saat ini ada 16 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang tersebar di beberapa kecamatan. Terdapat 300 anak berkebutuhan khusus yang belajar di tempat tersebut. Oleh karenanya ia berusaha mewujudkan pembangunan PKBM yang terpusat di satu tempat. Hal itu untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Sementara itu Bunda PAUD Sidoarjo Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan komitmen terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus tidak hanya dari pemerintah saja. Butuh peran semua pihak untuk mewujudkan pelayanan ABK yang lebih baik. Seperti dari organisasi pendidikan maupun pihak swasta. Selain itu kader PKK juga harus ikut berkomitmen untuk mendukung pendidikan bagi ABK. ● **dar**

DUTA



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## DPW PAN Jatim Lirik Suara Warga Nahdliyin di Sidoarjo

MH/Tim iNewsSidoarjo.id · Selasa, 13 Juni 2023 | 18:13 WIB



Pengurus DPW PAN Jatim ketika bersilaturahmi ke pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo, Selasa (13/6/2023).  
(Foto : iNewsSidoarjo.id).

**SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id** - Ketua DPW PAN Jatim, Rizki Gadig mengungkapkan, partainya sangat terbuka pada kader-kader Nahdliyin. Saat ini, menurut dia, dari 11 dapil untuk DPR RI sudah 5 dapil yang kami representasikan untuk kalangan pondok pesantren.

**iNewsSidoarjo.id**

"Artinya sudah 50 persen diisi tokoh-tokoh maupun anaknya kyai NU. Diantaranya dari Pondok Sidogiri, Syekh Abdul Qodir Jailani, Amantul Ummah, Peta Tulungagung dan Madura," jelas dia ketika bersilaturahmi bersama pengurus DPW PAN Jatim ke pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo, Selasa (13/6/2023).

Lebih jauh Rizky menuturkan, suara DPT (daftar pemilih tetap -red) Kabupaten Sidoarjo sekitar 1,4 juta. Sementara yang menggunakan hak suaranya pada tahun 2019 sejumlah 1 juta suara. Menurut dia, yang memilih PKB itu 300 ribu suara dan yang memilih PPP itu 20 ribu suara.

"Padahal tadi menurut paparan dari Ketua PCNU bahwa mayoritas masyarakat Sidoarjo itu 60 persen warga nahdliyin, artinya masih banyak suara nahdliyin yang belum terayomi," ungkapnya.

Menurut dia, jika 60 persen warga Sidoarjo itu nahdliyin, maka jumlah kursi PKB tercermin dari jumlah itu. Namun, menurut dia, saat ini kursi PKB di DPRD Sidoarjo ada 16 kursi. Itu artinya peluang untuk suara warga nahdliyin masih cukup besar.

"Tidak harus mengganggu kader yang militansi dan punya kedekatan dengan PKB," Ujarnya.

**iNewsSidoarjo.id**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Asyik Naik Pesawat Tak Perlu Pakai Masker, Ini Syaratnya

Selasa, 13 Juni 2023 16:45 WIB



Bandara Internasional Juanda Surabaya. Penumpang pesawat tak perlu pakai masker lagi. (Foto: Aini Arifin/Ngopibareng.id)

Transisi menuju masa endemi COVID-19 direspon oleh PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini terkait syarat perjalanan udara bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).



Aturan sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

"Kami selaku operator bandara siap mendukung dan mengimplementasikan aturan syarat perjalanan terbaru. Kami menyambut ini dengan sangat positif, tentunya dengan semangat transisi menuju endemi," jelas General Manager Bandar Udara Internasional Juanda, Sisyani Jaffar, Selasa, 13 Juni 2023.

Dalam SE Kemenhub tersebut, PPDN dan PPLN yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara dianjurkan untuk tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.

#### Advertisement

PPDN dan PPLN juga diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Sedangkan untuk PPDN dan PPLN yang sedang dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19, dianjurkan untuk tetap menggunakan masker.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Suasana di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Para penumpang pesawat tampak tak pakai masker lagi. (Foto: Aini Arifin/Ngopibareng.id)

Kendati demikian, lanjut Sisyani Jaffar, para penumpang tetap dianjurkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi, anjuran untuk tetap melaksanakan physical distancing atau menghindari kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19.

"Serta disarankan untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," jelasnya.



Sisyani Jaffar optimis dengan berlakunya SE Kemenhub Nomor 16 Tahun 2023 tersebut, akan berdampak positif pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bepergian dengan transportasi udara. "Sehingga harapannya trafik di Bandara Juanda dapat pulih seperti sebelum pandemi," tuturnya.

Menurut data Mei 2023, jumlah penumpang yang dilayani Bandar Udara Internasional Juanda sejumlah 5,5 juta penumpang atau tumbuh 44 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau sejumlah 3,8 juta penumpang.

"Sehingga jika dirata-rata, per hari kami dapat melayani 37 hingga 38 ribu penumpang. Dengan perubahan aturan syarat perjalanan ini kami berharap jumlah penumpang harian dapat bertambah," pungkas Sisyani Jaffar.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Cegah Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, Polisi RW Blusukan ke Sekolah



admin

Jun 13, 2023 - 12:07





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

NUSADAILY.COM - MALANG-Mewujudkan generasi anti narkoba, Polres Malang melalui Polisi RW melakukan sosialisasi anti narkoba ke sekolah di wilayah Kabupaten Malang. Edukasi diberikan saat upacara bendera oleh Polisi RW Polsek Bululawang.

Seperti dilakukan oleh Iptu Gandhi Suko, kepada murid sekolah SMPN 2 Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (12/6/23).

Kapolsek Bululawang Kopol Ainun Djariyah mengatakan, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dimulai dari pengetahuan tentang bahaya narkoba. Pemberian pemahaman ini dilakukan oleh Polisi RW agar mereka sebagai generasi muda dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

"Polisi RW memberikan sosialisasi anti narkoba ke sekolah SMPN 2 Bululawang, Kegiatan diikuti sebanyak lebih dari 300 Pelajar, Alhamdulillah para pelajar dalam mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba sangat antusias, sehingga upaya yang kita lakukan ini diharapkan bisa membangun kemampuan dan ketahanan diri dari pengaruh narkoba," ucap Kopol Ainun.

Sementara itu, Polisi RW Iptu Gandhi Suko dalam sosialisasi menyampaikan tentang bahaya dan dampak narkoba dan obat-obatan terlarang yang semakin meresahkan dan membahayakan generasi muda.

"Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar antara lain kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya," jelas IPTU Gandhi.

Seperti diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek amfetamin, stimulan, dan depresan.

Sosialisasi anti narkoba yang dilakukan kali ini, pihaknya juga memberikan contoh berbagai macam jenis narkoba yang umum beredar di kalangan luas. Termasuk dampak negatif yang ditimbulkan terhadap penyalahguna narkoba, serta ancaman pidana bagi pengedar dan penyalahguna narkoba.



"Melalui sosialisasi ini kami sampaikan dampak akibat menyalahgunakan narkoba, karena kita tahu generasi muda adalah calon pemimpin bangsa di masa depan, kita ingin mereka terbebas dari Narkoba dan berikan pengetahuan sejak dini," imbuhnya.

Kepolisian berharap, seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan tekad untuk memberantas penyakit masyarakat. Apabila menemukan disekeliling kita pengguna narkoba atau ada yang coba-coba, maka diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas, maupun Call Center 110 ataupun WA Soegab 0811482000.

Pencegahan, dan penanggulangan terhadap bahaya narkoba merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat maupun aparat penegak hukum. Setiap lapisan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mampu mendeteksi awal bahaya narkoba, serta dapat menjadi pelopor anti narkoba.

"Sehingga harapannya nanti terbentuk suatu karakter dan tertanam dari jiwa siswa sejak dini untuk anti terhadap penyalahgunaan narkoba," pungkasnya.(ap/wan)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara Studi Tiru Pelayanan UPTD ABK Sidoarjo



Media online [Kharismanews.id](https://kharismanews.id) · Published 14/06/2023

Last updated: 2023/06/14 at 12:06 AM

Share    



Sidoarjo, [Kharismanews.id](https://kharismanews.id) – Pokja (Kelompok Kerja) Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara mengunjungi Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya studi tiru pelayanan UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kabupaten Sidoarjo, Senin, (12/6). Pagi tadi mereka datang ke UPTD ABK Sidoarjo. Rombongan dipimpin oleh Bunda PAUD Deli Serdang sekaligus Ketua TP.PKK Deli Serdang Hj. Yunita Ashari Tambunan. Perempuan tersebut merupakan istri Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan saat ini.

Media Online Nasional  
**KHARISMANEWS.id**  
Profesional - Independen - Kompeten

Saat tiba di UPTD ABK Sidoarjo, Hj. Yunita disambut hangat oleh Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo yang juga Ketua TP.PKK Sidoarjo Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor S.Hum. Hj. Sa'adah tidak lain istri Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP.



Hj. Yunita menyampaikan Kabupaten Deli Serdang masih terus berbenah memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia melihat Kabupaten Sidoarjo mampu mewujudkan pelayanan pendidikan yang baik bagi ABK. Menurutnya keberadaan UPTD ABK Sidoarjo menjadi buktinya.

"Kegiatan kami ini akan menjadi bekal kami dalam membangun pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih baik lagi di daerah kami,"ucapnya.

Bunda PAUD Deli Serdang Hj. Yunita menilai UPTD ABK Sidoarjo telah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi ABK di Kabupaten Sidoarjo. Ia akan tiru pelayanan yang ada di UPTD ABK Sidoarjo. Pembangunan pusat pendidikan ABK seperti ini menjadi mimpinya untuk daerahnya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

"Kami berpikir bagaimana mewujudkan pusat pendidikan bagi ABK diwilayah kami, mudah-mudahan ini terwujud,"sampainya.

Hj. Yunita mengatakan saat ini ada 16 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang tersebar di beberapa kecamatan. Terdapat 300 anak berkebutuhan khusus yang belajar di tempat tersebut. Oleh karenanya ia berusaha mewujudkan pembangunan PKBM yang terpusat di satu tempat. Hal itu untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

"Kami memikirkan bagaimana Deli Serdang nanti mempunyai satu wadah seperti ini, jadi ranting-rantingnya itu di PKBM,"ujarnya.

Sementara itu Bunda PAUD Sidoarjo Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan komitmen terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus tidak hanya dari pemerintah saja. Butuh peran semua pihak untuk mewujudkan pelayanan ABK yang lebih baik. Seperti dari organisasi pendidikan maupun pihak swasta. Selain itu kader PKK juga harus ikut berkomitmen untuk mendukung pendidikan bagi ABK.

"Harus ada peran pentahelix, tidak hanya dari pemerintah kabupaten, swasta, tidak hanya peran dari organisasi pendidikan seperti Himpaudi, IGTKI maupun IGRA, tapi juga peran dari ibu-ibu kader PKK,"ujarnya.

Istri bupati Sidoarjo Gus Muhdlor yang akrab dipanggil Ning Sasha itu mengatakan orang tua juga harus mendukung pendidikan anaknya yang memiliki keterbatasan. Orang tua ABK harus memiliki keseriusan terhadap anaknya agar mandiri. Oleh karenanya orang tua ABK harus peduli terhadap pendidikan anaknya.

"Harus ada kontrak orang tua dengan lembaga (UPTD ABK Sidoarjo) supaya orang tua ada keseriusan menjadikan anaknya nanti mandiri,"ucapnya.

Media Online Nasional  
**KHARISMANEWS.id**  
Profesional - Independen - Kompeten

Kepala UPTD ABK Sidoarjo Nishrina Khamida menyampaikan ada beberapa layanan yang diberikan UPTD ABK Sidoarjo. Diantaranya layanan skrining ABK, assesmen ABK, intervensi ABK serta support system. Terdapat 53 orang yang mengabdikan diri di UPTD ABK Sidoarjo. Mereka diantaranya sebagai psikolog klinis, visio trapis maupun tenaga terapis pendidik.

"Fungsi UPTD ABK Sidoarjo antara lain identifikasi dan deteksi dini, layanan intervensi dini, layanan kelas transisi dan juga support system,"ujarnya

Dalam kesempatan tersebut rombongan diantar untuk melihat satu persatu ruang kelas. Diantaranya ruang Snozelen, ruang motorik besar, kelompok kecil, kelas transisi dan ruang bina diri untuk membekali ABK keterampilan. (Sund/Git)

Media Online Nasional  
**KHARISMANEWS.id**  
Profesional - Independen - Kompeten



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Bupati Sidoarjo Kawal BSB Tahap III di Kecamatan Sukodono Tersalur ke KPM



Media online Kharismanews.id · Published 14/06/2023

Last updated: 2023/06/14 at 12:37 AM

Share f t e b



Sidoarjo, Kharismanews.id – Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III dari Kemensos RI untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Keluarga Harapan (PKH). BSB tahap III Kabupaten Sidoarjo mulai disalurkan awal Juni Lalu, penyerahan secara simbolis oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, untuk 5 desa di Kecamatan Sukodono, hari ini (13/6).

Media Online Nasional  
**KHARISMANEWS.id**  
Profesional - Independen - Kompeten

Penyerahan BSB pertama di Desa Wilayut, total penerima BSB 130 KPM, diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Drs. Misbahul Munir, karena Bupati berhalangan hadir. Desa kedua, Desa Kebonagung, diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo ke 186 KPM. Dilanjut ke Desa Pekarungan sebanyak 186 KPM. Selanjutnya Desa Suruh 156 KPM. Terakhir di Desa Jumputrejo.

"Bantuan pangan ini semua desa di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan BSB. BSB tahap III ini merupakan tahap akhir. Program ini baik, harus dieksekusi baik hingga ke penerimanya. Program ini, program uji coba untuk program selanjutnya," jelasnya.

Ia juga memastikan ke Kepala desa Pekarungan, Effendi bahwa semua warga Desa Pekarungan menerima BSB ini mulai tahap 1 hingga tahap 3. Kemarin Kabupaten Sidoarjo mendapat jatah 276 ribu sak. Harapannya program pusat ini berlanjut tahun depan.

"Saya berpesan kalau disekitar panjenengan semua, jika ada warga yang tidak mampu, atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari – hari, segera lapor ke Dinsos Kabupaten, " pintanya. .

Sedangkan dari Ketua Satgas Bansos KC Sidoarjo, PT Pos Sidoarjo Enjang wagyosuyoso, selaku penyalur. BSB tahap III mulai didistribusikan mulai tanggal 3 Juni 2023, pertama di Kecamatan Jabon. Penyerahan mulai serentak serin kemarin, 12 Juni 2023.

"Untuk Kecamatan yang sudah tersalurkan 100 persen saat ini, Prambon, Candi. Untuk total kecamatan yang paling banyak penerima BSB ini adalah Kecamatan Tarik, sekitar 8.236 KPM, yang paling sedikit Kecamatan Buduran sekitar 2.700 an," jelasnya.

Ia juga menjelaskan total penerima BSB di Kabupaten Sidoarjo sebesar 92.685. untuk penyaluran BSB ini kolaborasi antara Bulog selaku penyedia beras, Dinas sosial untuk data KPM/ data PKH, dan PT Pos Indonesia selaku penyalur, dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi untuk pengawasan.(kominfo/sund)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Layanan Retribusi Manual Bakal Dihapus, Gus Muhdlor Siapkan Skema Digital



Media online [Kharismanews.id](https://kharismanews.id) · Published 14/06/2023

Last updated: 2023/06/14 at 12:22 AM

Share

SHARE



Media Online Nasional  
**KHARISMANEWS.id**  
Profesional - Independen - Kompeten

Sidoarjo Kharismanews.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam waktu dekat ini bakal menghapus layanan retribusi manual diganti skema retribusi digital. Untuk mempercepat realisasi program tersebut sejumlah OPD penarik retribusi menandatangani komitmen bersama dalam high level meeting bersama sejumlah OPD pemungut retribusi untuk berdiskusi bersama membahas Implementasi Elektronifikasi Transaksi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo di Ballroom hotel Luminor, Selasa (13/6).

Bupati Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor juga meminta sinergisitas elektronifikasi antar dinas berjalan secara holistik dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo selaku koordinator menghadirkan Kabag Organisasi, Kajari, Bank Jatim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta Mendagri serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Gus Muhdlor mengatakan saat ini sejumlah instansi tidak bisa lepas dari digitalisasi terutama dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, elektronifikasi juga dapat memangkas birokrasi yang berbelit menjadi lebih mudah.

“Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan,” kata Gus Muhdlor.

Menurutnya, sudah tidak jamannya memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual, sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan.

Bupati Sidoarjo juga menambahkan bahwa semakin kita menghindari banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin lebih profesional dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

"Sudah tidak jamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit semua harus menerapkan digitalisasi," tegas Gus Muhdlor.

Selain itu sejumlah OPD penghasil retribusi juga berkomitmen untuk bersama-sama dalam mengimplementasi elektronifikasi transaksi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini ditandai dengan pdatangangan bersama terkait komitmen penagihan piutang bersama Kajari Sidoarjo dan pdatangangan komitmen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh OPD penghasil retribusi.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono menambahkan pembayaran elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri.

"Sebenarnya semua transaksi pembayaran dari sisi pendapatan utamanya, misalnya dinas yang memungut retribusi memang ada beberapa yang belum menerapkan digitalisasi, kalau pajak sudah 100% menerapkan digitalisasi," ungkap Ari.

Pihaknya mengatakan tujuan dari high level meeting yang digelar bertujuan untuk menyelaraskan pembayaran dan pelayanan berbasis digitalisasi oleh organisasi perangkat daerah.

"Ini penekanannya di tingkat OPD dulu untuk sosialisasinya nanti tergantung masing-masing OPD. Semoga pelayanan dinas yang masih menggunakan cara konvensional dapat mengikuti perkembangan zaman digital," terang Ari.

Direktur Kepala Group Sistem Pembayaran, Pengelolaan uang Rupiah dan Manajemen intern Bank Indonesia, Bandoe Widiarto mengapresiasi peningkatan pemahaman kepala OPD terkait manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan.

"Dari BI sendiri memang mendorong digitalisasi. Kami mendorong tiga hal yaitu digitalisasi bantuan sosial, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah dan digitalisasi transportasi," ungkap Bandoe.

Ia menegaskan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah menjadi sangat penting, mengingat dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) dan mewujudkan e-Government yang berkualitas dengan menerapkan satu pintu lewat digitalisasi.

Bandoe menerangkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sidoarjo mencapai angka 98% dari 100% yang meliputi semua aspek, untuk menuju angka 100% OPD di Sidoarjo harus selaras secara bersamaan menggunakan alat pembayaran elektronik.

"Misalnya transaksi retribusi yang masih menerapkan cara konvensional dengan karcis ini diarahkan untuk menggunakan elektronik," imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas melalui e-Government. (Sund/Ir)